



Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana bagi hasil (dbh), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kutai kartanegara

Muhammad Saleh¹, Priyagus^{2*}, Juliansyah Roy³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: priyagus@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Metode analisis data menggunakan Path Analisis dengan bantuan software SPSS versions 22 for windows. Dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, analisis path nalysis.

The effect of regional original income (pad), revenue-sharing funds (dbh), general allocation funds (dau), special allocation funds (dak) on regional spending and economic growth in Kutai Kartanegara Regency

Abstract

Data analysis method using Path Analysis with the help of software SPSS versions 22 for windows. From this research note that partially, Local Own Revenue influence insignificant to Expenditure Area, Profit Sharing Fund have significant effect to Local Expenditure, Non Profit Revenue Sharing Fund Natural, significant effect on Local Expenditure, General Allocation Fund has no significant effect on Local Expenditure, Special Allocation Fund has significant effect on Local Expenditure while Local Own Revenue, Profit Sharing Fund, Non- Tax Revenue Share Fund, General Allocation Fund, Fund Special Allocation, Regional Spending has significant effect on Economic Growth.

Keywords: Local own revenue, tax sharing fund, non-tax revenue share fund, general allocation fund, special allocation fund, regional expenditure, economic growth, path analysis analysis.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya data pertumbuhan ekonomi akan menunjukan sejauh mana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Adanya pertumbuhan yang positif menunjukan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaliknya bila negatif berarti menunjukan adanya penurunan kinerja perekonomian. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2008). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat.

Kajian pustaka

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka (Sukirno, 2004:9).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2009:169)

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan banyaknya jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini akan tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiosafis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persedian

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja

yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

Pajak Daerah.

Retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. (Darise, 2009:48).

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Sidik, 2004). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP).

Menurut Elmi (2002:56) dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu pembagian hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penerima perpajakan (tax sharing). Penerimaan yang di bagi hasilkan terdiri atas:

Penerima Pajak:

Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

PPH Orang Pribadi

Penerimaan Bukan Pajak:

Sektor Kehutanan

Sektor Pertambangan Umum

Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam

Sektor Perikanan

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

METODE

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kontruksi diagram analisis jalur (Path Analysis) analisis jalur berfungsi untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel. Untuk melihatnya digunakan koefisien jalur yang tidak lain adalah koefisien regresi yang distandardkan (standardized path coefficients). Ini digunakan untuk menjelaskan basarnya pengaruh (bukan memprediksi) variabel eksogen terhadap variabel endogen (Ridwan 2012 : 80).

Terdapat tiga struktur jalur yang akan dianalisis dan seluruhnya akan diuji secara simulan. Untuk kepentingan ini, maka penulis memutuskan untuk menggunakan software SPSS (statistical package for service solusion) versi 22.

HASIL DAN PENELITIA

Hasil Analisis Jalur

Hasil Analisis Struktur Pertama Tabel 4.9 Hasil Analisis Struktur Pertama

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,701	5,596		-1,037	,358
PAD (X1)	1,979	,723	,130	2,738	,052
DBHP (X2)	,927	,038	,385	24,562	,000
DBHBP SDA (X3)	1,121	,080	,878	14,050	,000
DAU (X4)	,994	,409	,072	2,427	,072
DAK (X5)	6,976	1,257	,095	5,548	,005

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber. Lampiran 1 SPSS

Persamaan strukturalnya ialah :

$$Y_1 = P_1 Y_1 X_1 + P_2 Y_1 X_2 + P_3 Y_1 X_3 + P_4 Y_1 X_4 + P_5 Y_1 X_5 + 1$$

$$P_1 Y_1 X_1 = 0,130$$

$$P_2 Y_1 X_2 = 0,385$$

$$P_3 Y_1 X_3 = 0,878$$

$$P_4 Y_1 X_4 = 0,072$$

$$P_5 Y_1 X_5 = 0,095$$

Persamaan Path Analysis yang menjelaskan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil Pajak (X2), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (X3), Dana Alokasi Umum (X4), Dana Alokasi Khusus (X5), terhadap Belanja Daerah (Y1), dapat dibentuk sebagai berikut : Uji Kelayakan Model Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	PAD (X1)	DBHP (X2)	DBHBP SDA (X3)	DAU (X4)	DAK (X5)
N	14	14	14	12	11
Normal Mean	5,2143	6,1429	7,8571	5,4167	4,7273
Parameters,a,b Std. Deviation	3,65478	5,84702	6,22245	2,41681	2,08121
Most Extreme Absolute Differences	,152	,224	,138	,180	,235
Positive	,152	,224	,124	,139	,235
Negative	-,146	-,182	-,138	-,180	-,142
Test Statistic	,152	,224	,138	,180	,235
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200c,d	,056c	,200c,d	,200c,d	,092c

Test distribution is Normal.

Calculated from data.

Lilliefors Significance Correction.

This is a lower bound of the true significance.

Sumber. Lampiran 2 SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 (0,200>0,05). Nilai signifikansi

Dana Bagi Hasil Pajak (X2) sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05 ($0,056 > 0,05$). Nilai
 Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6,701	5,596		-1,037	,358		
PAD (X1)	1,979	,723	,130	2,738	,052	,139	2,720
DBHP (X2)	,927	,038	,385	24,562	,000	,359	2,788
DBHBP SDA (X3)	1,121	,080	,878	14,050	,000	,123	4,248
DAU (X4)	,994	,409	,072	2,427	,072	,199	1,089
DAK (X5)	6,976	1,257	,095	5,548	,005	,299	3,341

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber. Lampiran 3 SPSS

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa nilai Tolerance variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,139, Dana Bagi Hasil Pajak (X2) sebesar 0,359, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (X3) sebesar 0,123, Dana Alokasi Umum (X4) sebesar 0,199, dan Dana Alokasi Khusus (X5) sebesar 0,299 lebih besar dari 0,10. Sementara itu Nilai VIF variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 2,720 Dana Bagi Hasil Pajak (X2) sebesar 2,788 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (X3) sebesar 4,248 Dana Alokasi Umum (X4) sebesar 1,089 dan Dana Alokasi Khusus (X5) sebesar 3,341 yaitu lebih kecil dari

10.00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5,441	4,755		1,361	,245
PAD (X1)	,301	,297	1,835	1,012	,369
DBHP (X2)	-,022	,016	-,828	-1,387	,238
DBHBP SDA (X3)	-,033	,033	-2,379	-1,001	,374
DAU (X4)	-,129	,168	-,870	-,766	,486
DAK (X5)	-,663	,517	-,839	-1,284	,268

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,369, Dana Bagi Hasil Pajak (X2) sebesar 0,238, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (X3) sebesar 0,374, Dana Alokasi Umum (X4) sebesar 0,486, dan Dana Alokasi Khusus (X5) sebesar 0,268 dan nilai signifikansi dari lima variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi (Model Summaryb)

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992a	,985	,977	,27618	2,626

Predictors: (Constant), DAK (X5), DBHBP SDA (X3), DBHP (X2), DAU (X4), PAD (X1)

Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber.lampiran 5 SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Durbin Watson yang didapatkan adalah sebesar 2.626 pengambilan keputusan dengan uji Durbin Watson dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan nilai dL dan dU pada tabel Durbin Watson dengan nilai signifikansi 5% atau 0,05 dengan (n=14) dan jumlah variabel independent (K=5), nilai dL adalah 0,506 sedangkan nilai dU adalah 2,296. Karena $dL < dW < dU$ yaitu $0,506 < 2,626 < 2,296$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

Tabel 4.14 Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	,992a	,985	,977	,27618
---	-------	------	------	--------

Predictors: (Constant), DAK (X5), DBHBP SDA (X3), DBHP (X2), DAU (X4), PAD (X1)

Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber. Lampiran 6 SPSS

Tabel 4.15 HASIL Uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,570	5	5,141	267,288	,000b
Residual	,070	4	2,268		
Total	2,640	9			

Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Predictors: (Constant), DAK (X5), DBHBP SDA (X3), DBHP (X2), DAU (X4), PAD (X1)

Sumber. Lampiran 7 SPSS

Pengujian Hipotesis

Uji Secara Parsial (Uji t) Tabel 4.16 Hasil Uji t

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-6,701	5,596		-1,037	,358
PAD (X1)	1,979	,723	,130	2,738	,052
DBHP (X2)	,927	,038	,385	24,562	,000
DBHBP SDA (X3)	1,121	,080	,878	14,050	,000
DAU (X4)	,994	,409	,072	2,427	,072
DAK (X5)	6,976	1,257	,095	5,548	,005

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber. Lampiran 8 SPS

Hasil Analisis Struktur Kedua Tabel 4.17 Hasil Analisis Struktur Kedua

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5,256	2,446		2,149	,053
BELANJA DAERAH (Y1)	2,032	1,213	,458	1,786	,007

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y2)
Uji Kelayakan Model Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BELANJA DAERAH (Y1)	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)
N		14	14
Normal Parameters,a,b	Mean	9,2143	1,3043
	Std. Deviation	8,75775	4,21553
Most Extreme Differences	Absolute	,126	,100
	Positive	,113	,078
	Negative	-,126	-,100
Test Statistic		,126	,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d	,200c,d

Test distribution is Normal.

Calculated from data.

Lilliefors Significance Correction.

This is a lower bound of the true significance.

Sumber. Lampiran 10 SPSS

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas (Independen). Pengujian ini dapat dilihat dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independent. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dengan program SPSS versi 22. Disajikan pada tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,256	2,446		2,149	,053		
BELANJA DAERAH (Y1)	2,032	1,213	,458	1,786	,007	,439	6,220

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Sumber.Lampiran 11 SPSS

Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,852	1,462		1,267	,229
BELANJA DAERAH (Y1)	2,620	,320	,214	,758	,463

a. Dependent Variable: RES2

Sumber. Lampiran 12 SPSS

Tabel 4.21 Hasil Uji Autokorelasi (Model Summaryb)
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,458a	,210	,144	3,89994	1,473

Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH (Y1)

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Sumber. Lampiran 13 SPSS

Tabel 4.22 Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,458a	,210	,144	3,89994

a. Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH (Y1)

Sumber. Lampiran 14 SPSS

Tabel 4.23 HASIL Uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	48,505	1	48,505	3,189	,007b
Residual	82,514	12	15,210		
Total	131,019	13			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

(Y2)

b. Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH
(Y1)

Sumber. Lampiran 15 SPSS

Tabel 4.24 Hasil Uji t

Coefficientsa

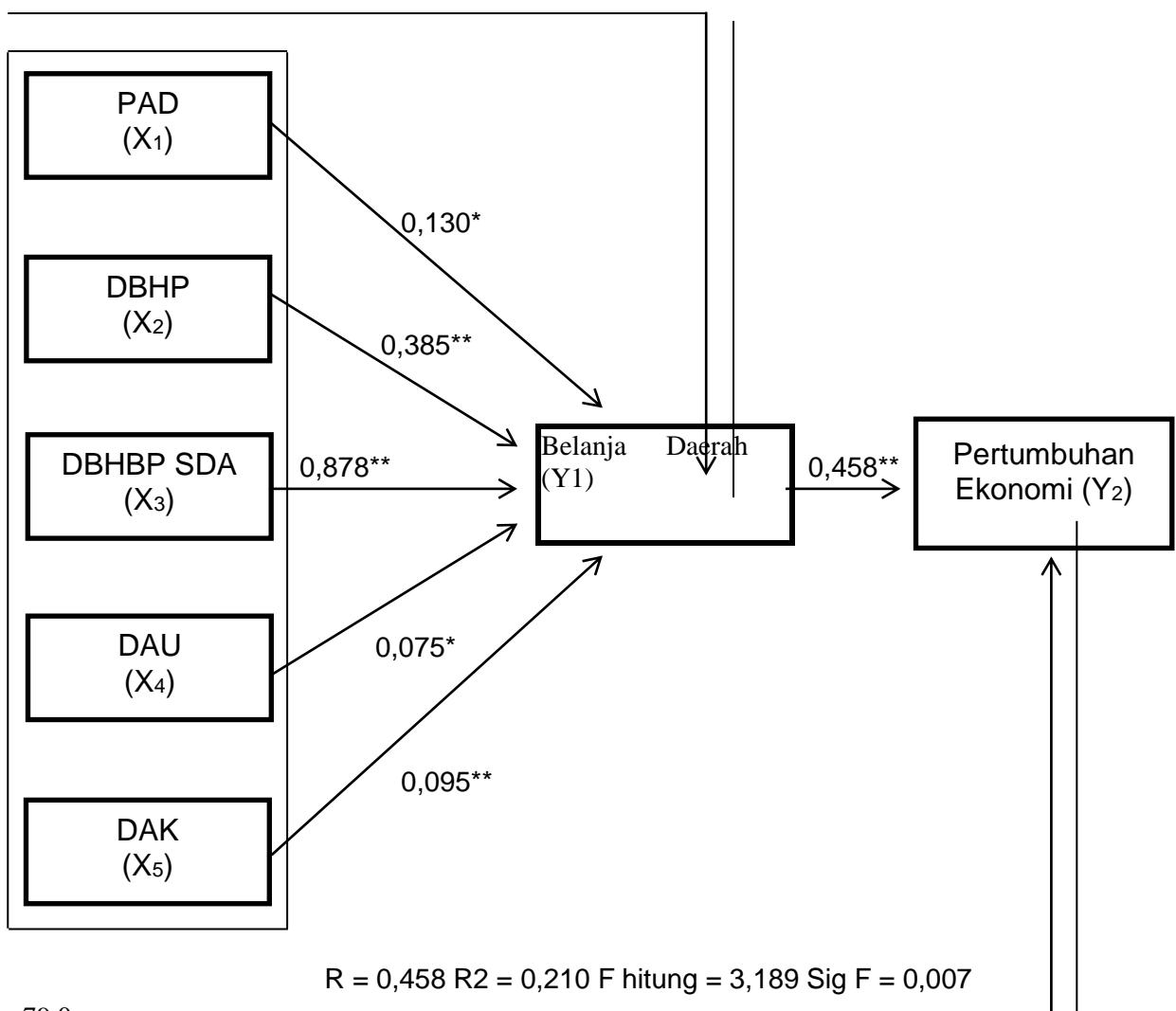
Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5,256	2,446		2,149	,053
BELANJA DAERAH (Y1)	2,032	1,213	,458	1,786	,007

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Sumber. Lampiran 16 SPSS

Diagram Path

R = 0,992 R² = 0,985 F hitung = 267.288 Sig F = 0,000 e1 = 1,5



Gambar 4.1 Jalur Diagram Path

Persamaan struktur untuk Diagram Path tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.25 Diagram Path

No	Variabel	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh Total	t tabel	Signifikan
1	X1Y1	0,130	-	-	2,738	0,052
2	X2Y1	0,385	-	-	24,562	0,000
3	X3Y1	0,878	-	-	14,050	0,000
4	X4Y1	0,075	-	-	2,427	0,072
5	X5Y1	0,095	-	-	5,548	0,005
6	Y1Y2	0,458	-	-	1,786	0,007
7	X1Y2	-	-	0,05954	-	-
8	X2Y2	-	-	0,017633	-	-
9	X3Y2	-	-	0,0402124	-	-
10	X4Y2	-	-	0,03435	-	-
11	X5Y2	-	-	0,04351	-	-

Pembahasan

1. Pengaruh secara langsung (direct effect)

1. Pengaruh secara langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Kutai

Kartanegara. Artinya apabila meningkatnya Pendapatan Asli Daerah masih belum bisa untuk membiayai keseluruhan pengeluaran belanja daerah, dikarnakan masih sangat terbatasnya sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Hal ini dapat dikarnakan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 5% persen sampai dengan 10% persen terhadap belanja daerah, dimana pajak daerah, dan retribusi daerah masih belum bisa memberikan perkembangan yg signifikan di setiap tahunnya dan penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah yaitu dari Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan kekayaan Yg dipisahkan. karna ada investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Daerah atau (Perusda). Guna membantu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah disetiap tahunnya masih belum bisa membiayai besarnya jumlah keperluan belanja daerah, terutama di belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa, sehingga dari empat belas tahun terakhir penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Hanya dibawah 393.605.879 Milyar Rupiah.

Kemungkinan dikarnakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus di arahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya

apabila meningkatnya Pendapatan Asli Daerah masih belum bisa untuk membiayai keseluruhan pengeluaran belanja daerah, dikarnakan masih sangat terbatasnya sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya apabila meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak maka pengeluaran untuk membiayai alokasi belanja daerah akan meningkat pula.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. artinya apabila meningkatnya pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam maka akan meningkat pula pendapatan daerah, guna untuk membiaya pengeluaran alokasi belanjdaerah.

Dana Alokasi Umum secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya apabila meningkatnya Dana Alokasi Umum masih belum bisa untuk membiayai pengeluaran belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya apabila meningkatnya dana alokasi khusus maka akan meningkat pula pengeluaran belanja daerah.

Belanja Daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara. artinya apabila meningkatnya pengeluaran belanja daerah maka akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. bahwa rendahnya kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. bahwa besarnya kontribusi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam adalah kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Dana Alokasi Umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. bahwa rendahnya kontribusi Dana alakosi Umum masih belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. bahwa besarnya kontribusi Dana alakosi Khusus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penelitian mengemukakan saran sebagai berikut :

Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai objek penelitian ini dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi daerah seperti Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Penggelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah, agar dapat mebiayai Belanja Daerah terutama meningkatkan Belanja Modal untuk Pembangunan di Daerah, Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelayanan publik.

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi seperti menggunakan variabel Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat lagi. Karena penelitian ini hanya berfokus pada faktor kuantitatif, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor kualitatif sehingga permasalahan yang terjadi dapat lebih akurat hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Badan Pusat Statistik. 2015. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2015. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
6. , Badan Pusat Statistik. 2014. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2014. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
7. , Badan Pusat Statistik. 2013. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2013. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
8. , Badan Pusat Statistik. 2012. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2012. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
9. , Badan Pusat Statistik. 2011. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2011. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
10. , Badan Pusat Statistik. 2010. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2010. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
11. , Badan Pusat Statistik. 2009. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2009. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.

12. , Badan Pusat Statistik. 2008. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2008. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
13. , Badan Pusat Statistik. 2007. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2007. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
14. , Badan Pusat Statistik. 2006. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2006. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
15. , Badan Pusat Statistik. 2005. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2005. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
16. , Badan Pusat Statistik. 2004. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2004. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
17. , Badan Pusat Statistik. 2003. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2003. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
18. , Badan Pusat Statistik. 2002. Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2002. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
19. , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
20. , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
21. , Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Dana Perimbangan.
22. , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Belanja Daerah.
23. , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
24. , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Mohammad Rizal Mubaroq, Sutyastie S Remi, Bagdja Muljarijadi. 2013. Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Indonesia Tahun 2005 – 2010.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Dewi Kurniawati Sanusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi.
- Susanto, dkk. 2010. Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah. Erlangga. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Macanan Jaya Cemerlang. Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Lembaga Informasi Nasional, 2001. Panduan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta.
- Sudrajad, 1999. Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha. Bumi Aksara. Jakarta.
- Usman, Marzuki. Dan Seldadyo, Harry. 1997. Kiat Sukses Pengusaha Kecil. Institut Bankir Indonesia. 1997.

- Arsyad. Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kedua. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1990. Industri Kecil Dan Kesempatan Kerja. Pusat Penelitian Universitas Andalas Dengan Dana SPP/DPP Pusat Penelitian, Padang
- Kadir, Abdul. 2010. Energi : Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Irawan dan M. Supramoko. 1997. Ekonomi Pembangunan. Liberty, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1998. Ekonomi Pembangunan. Boarta Gara, Medan.
40. . 2000. Makro Ekonomi Modern perkembangan pemikiran klasik
41. . 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo
42. . 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Murni, Asfia. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT Refika Aditama, Bandung.
- . 2009. Ekonomika Makro. PT Refika Aditama, Bandung.
- Jhingan, M.L. 2008. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. PT Media Global Edukasi, Jakarta.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi Ketujuh. Erlangga, Jakarta.
- Meliyana, Michael P dan Stephen C Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Djojohandikusumo, Soemitro. 1995. Ekonomi Pembangunan. PT Pembangunan, Jakarta.
- Siahaan, Nurahman P., 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Parayangan, Anggi Yanti. Dan Sari, Riyanti Linda. 2014. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PT. Global Lindo Jakarta.
- Hanum Pradijo, Halim 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum, Kota Semarang. FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hendriawan, Marihot P., 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Mandiri Jaya Jakarta.
- Pasaribu, Lia Destiana. Sari, Raina Linda. 2014. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PT. Permadani Indah Tbk. Jakarta.